

STATUS PEMBANGUNAN DESA TANJUNGSARI KECAMATAN CIJERUK KABUPATEN BOGOR

Nur Afifah Oktaviani⁽¹⁾, Mujio⁽²⁾, Novida Waskitaningsih⁽³⁾

ABSTRAK

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sebuah desa dan mendorong pembangunan nasional yang dikenal sebagai pembangunan desa. Klasifikasi desa menurut Indeks Pembangunan Desa (IPD) menunjukkan kemajuan mereka. Data IPD tahun 2018 menunjukkan bahwa 5.606 desa mandiri, 55.369 desa berkembang, dan 14.461 desa tertinggal. Desa Tanjungsari adalah desa dengan nilai IPD paling rendah di Kecamatan Cijeruk dengan nilai IPD 72,17 dan berstatus berkembang. Pengukuran IPD sendiri terakhir pada tahun 2018 dan saat ini sudah tidak dipergunakan lagi karena digantikan oleh Indeks Desa Membangun. Oleh karenanya itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi eksisting pembangunan Desa Tanjungsari berdasarkan parameter IPD dan menganalisis IPD Desa Tanjungsari berdasarkan data potensi desa tahun 2021 dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis skoring untuk perhitungan IPD. Hasil dari penelitian ini, Desa Tanjungsari memiliki beberapa aspek yang cukup baik dan lengkap untuk melayani masyarakat desa. Ini termasuk aksesibilitas dan transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan. Namun pelayanan dasar dan infrastruktur masih kurang lengkap. Hal ini dikarenakan masih dari kedua aspek tersebut masih terdapat fasilitas yang belum tersedia maupun kurang untuk melayani masyarakat Desa Tanjungsari, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nilai IPD Desa Tanjungsari berdasarkan data potensi desa tahun 2021 mengalami peningkatan dari 72,17 pada tahun 2018 menjadi 73,66. Namun status pembangunan Desa Tanjungsari tetap desa berkembang.

Kata kunci: indeks pembangunan desa, status pembangunan desa.

ABSTRACT

Means to improve the welfare of the people in a village and encourage national development are known as village development. Village classification according to the Village Development Index (IPD) shows their progress. IPD data for 2018 shows that 5,606 villages are independent, 55,369 villages are developing, and 14,461 villages are underdeveloped. Tanjungsari Village is the village with the lowest IPD value in Cijeruk District with an IPD value of 72.17 and has developing status. The last IPD measurement was in 2018 and is no longer used because it was replaced by the Village Development Index. Therefore, the aim of this research is to identify the existing development conditions of Tanjungsari Village based on IPD parameters and analyze the IPD of Tanjungsari Village based on village potential data in 2021 using descriptive analysis methods and scoring analysis for IPD calculations. The results of this research show that Tanjungsari Village has several aspects that are quite good and complete to serve the village community. This includes accessibility and transportation, public services, and government administration. However, basic services and infrastructure are still incomplete. This is because from these two aspects there are still facilities that are not yet available or lacking to serve the people of Tanjungsari Village, such as educational, health and economic facilities. The IPD value of Tanjungsari Village based on village potential data in 2021 has increased from 72.17 in 2018 to 73.66. However, the development status of Tanjungsari Village remains a developing village.

Keywords: village development index, village development status.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa sangat penting untuk pembangunan wilayah, menghilangkan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan geografis. Pembangunan desa di Indonesia saat ini telah meningkat dengan rata-rata 2,29% atau 1.409 desa per tahun (Soleh, 2017). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan warga desa melalui peningkatan fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, perdamaian, keamanan, dan keagamaan wilayah desa (Widiyaningrum et. Al., 2021). Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas kehidupan, dan pengentasan kemiskinan. Tujuan ini dicapai melalui pengembangan kebutuhan dasar, pengembangan infrastruktur dan sara, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Salah satu pendekatan pemerintah untuk mencapai pembangunan nasional secara menyeluruh adalah pembangunan desa. Ada dua bagian utama pembangunan desa, menurut Adisasmita (2018). Satu adalah pembangunan dalam aspek fisik, yang fokus pada pembangunan fisik, seperti pembuatan sarana, prasarana, dan manusia. Sementara itu, pembangunan dalam aspek pemberdayaan manusia, yang fokus pada pengembangan dan peningkatan kemampuan dan ketersediaan.

Indeks Pembangunan Desa (IPD) menilai status desa berdasarkan potensi datanya. IPD mengklasifikasikan desa menjadi Desa Mandiri dengan nilai IPD lebih dari 75, Desa Berkembang dengan nilai IPD antara 50 dan 75, dan Desa Tertinggal dengan nilai IPD di bawah 50. Hasil IPD tahun 2018 berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa terdapat 5.606 desa mandiri, 55.369 desa berkembang, dan 14.461 desa tertinggal; tujuan Kemendesa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi adalah untuk mengubah 10.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang dalam RPJMN tahun 2020–2024. Di seluruh Indonesia, rata-rata IPD adalah 59,36, yang menunjukkan bahwa desa-desa masih termasuk dalam kategori desa berkembang. Begitu juga Kabupaten Bogor yang masih tergolong desa berkembang dengan nilai IPD 70,99. 70% desa di Kabupaten Bogor masih

tergolong desa berkembang, termasuk Desa Tanjungsari, Kecamatan Cijeruk.

Jika dibandingkan dengan semua desa di Kecamatan Cijeruk, Desa Tanjungsari memiliki nilai IPD paling rendah. Nilai rata-rata IPD Kecamatan Cijeruk adalah 74,30 dengan nilai IPD tertinggi adalah Desa Cipelang yaitu 76,89 dengan status desa mandiri dan nilai IPD terendah adalah Desa Tanjungsari yaitu 72,17 dengan status desa berkembang. Di Kecamatan Cijeruk, ada lima desa yang berstatus mandiri: Desa Cijeruk, Desa Cipelang, Desa Warung Menteng, dan Desa Palasari. Sedangkan desa yang masih berstatus desa berkembang terdiri Desa Tajurhalang, Desa Cibalong, Desa Sukaharja, Desa Cipicung, dan Desa Tanjungsari.

Pengukuran IPD itu sendiri terakhir pada tahun 2018 dan saat ini sudah tidak dipergunakan lagi karena digantikan oleh Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2021. Perubahan dari IPD menjadi IDM dimaksudkan untuk memberikan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam mengukur pembangunan tingkat desa dengan mencakup pembangunan fisik dan nonfisik. Namun untuk tetap menilai kemajuan status pembangunan Desa Tanjungsari berdasarkan parameter Indeks Pembangunan Desa dengan mengacu data potensi desa tahun 2021, maka perlu adanya penelitian “Status Pembangunan Desa Tanjungsari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor.”

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kondisi eksisting pembangunan Desa Tanjungsari berdasarkan parameter Indeks Pembangunan Desa (IPD).
2. Menganalisis status pembangunan Desa Tanjungsari berdasarkan data potensi desa tahun 2021.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini fokus pada Desa Tanjungsari di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dengan luas 223,61 ha.

Dalam penelitian ini, ada dua metode pengumpulan data: data primer dan data sekunder. Studi literatur dan survei instansi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, sedangkan dokumentasi dan

observasi lapangan digunakan untuk mengumpulkan data primer.

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan analisis skoring menggunakan standar perhitungan IPD. Tujuan penelitian pertama adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan saat ini Desa Tanjungsari berdasarkan lima parameter IPD: pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintah. Pada analisis ini dilakukan dengan mengumpulkan data kondisi pembangunan Desa Tanjungsari dengan menggunakan data observasi lapangan, data profil desa, dan data potensidesa tahun 2021. Sedangkan analisis skoring menggunakan standar perhitungan IPD digunakan untuk mencapai tujuan 2. Analisis ini dimaksudkan untuk menentukan status pembangunan Desa Tanjungsari dengan menghitung nilai IPD Desa Tanjungsari dengan berdasarkan data potensi desa tahun 2021. Penyusunan IPD dimaksudkan untuk melihat perkembangan dan status pembangunan desa. Nilai IPD memiliki skala angka 0 sampai 100.

Untuk menghitung nilai IPD, data potensi desa tahun 2021 yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) harus digunakan untuk melakukan analisis skoring; kriteria penilaian yang ditetapkan oleh Bappenas (2018) dengan skala 0-5 digunakan untuk menilai setiap indikator pada setiap aspek pembangunan. Nilai IPD diperoleh dari hasil penjumlahan secara tertimbang dari masing-masing indikator penyusun IPD. Untuk penimbang masing-masing indikator dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1 Nilai Penimbang IPD

Aspek	Indikator	Nilai penimbang
Pelayanan Dasar	ketersediaan dan akses TK	0,0227852
	ketersediaan dan akses SD	0,0115521
	ketersediaan dan aksesSMP	0,0320783
	ketersediaan dan akses SMA	0,0317407
	ketersediaan dan akses rumah sakit	0,0271630
	ketersediaan dan akses rumah sakit bersalin	0,0258106
	ketersediaan dan kemudahan akses puskesmas	0,0310473

Aspek	Indikator	Nilai penimbang
	ketersediaan dan akses ke balai pengobatan	0,0308963
	ketersediaan dan akses praktek dokter	0,0325841
	ketersediaan dan akses bidan	0,0299338
	ketersediaan dan akses poskesdesa	0,0252111
	ketersediaan dan akses apotek	0,0253566
Infrastruktur	ketersediaan pertokoan, minimarket dan toko kelontong	0,0196165
	ketersediaan pasar	0,0179773
	ketersediaan restoran atau warung makan	0,0152138
	ketersediaan hotel atau penginapan	0,0186228
	ketersediaan bankg	0,0229853
	Elektrifikasi	0,0140417
	Kondisi penerangan di jalan utama	0,0188277
	bahan bakar memasak	0,0177782
	Sumber air untuk minum	0,0299481
	sumber air untuk mandi/mencuci	0,0301380
	fasilitas buang air besar	0,0137127
	ketersediaan dan fasilitas komunikasi selular	0,0160403
	ketersediaan fasilitas internet dan pengiriman pos	0,0172964
	Aksesibilitas	lalu lintas dan kualitas jalan
aksesibilitas jalan		0,0149853
ketersediaan angkutan umum		0,0426582
Operasionalg angkutan umum		0,0422595
waktu tempuh ke kantor camat		0,0177129
biaya transportasi ke kantor camat		0,0280166

Aspek	Indikator	Nilai penimbang
	waktu tempuh ke kantor bupati	0,0142172
	biaya transportasi ke kantor bupati	0,0264609
Pelayanan umum	penanganan KLB	0,0195116
	penanganan gizi buruk	0,0209339
	Ketersediaan fasilitas olahraga	0,0334978
	keberadaan kelompok kegiatan olahraga	0,0351981
Penyelenggaraan pemerintahan	kelengkapan pemerintahan desa	0,0260184
	otonomi desa	0,0163094
	aset/kekayaan desa	0,0198562
	kualitas SDM kepala desa	0,0186415
	kualitas SDM sekretaris desa	0,0279371

Sumber: Bappenas, 2018.

Selanjutnya setelah dilakukan analisis skoring dengan masing-masing indikator diberi skor, maka tahap berikutnya adalah menghitung nilai IPD dengan menggunakan rumus yang telah ditetapkan oleh Bappenas seperti sebagai berikut.

$$IPD = (I_1 * P_1 + I_2 * P_2 + I_3 * P_3 + \dots + I_{42} * P_{42}) * 20$$

Keterangan:

IPD = Nilai IPD Desa

I_1 = Skor indikator ke-1

I_2 = Skor indikator ke-2

I_3 = Skor indikator ke-3

.

I_{42} = Skor indikator ke-42

P_1 = Penimbang indikator ke-1

P_2 = Penimbang indikator ke-2

P_3 = Penimbang indikator ke-3

.

P_{42} = Penimbang indikator ke-42

Setelah perhitungan IPD tersebut, nilai IPD dapat digunakan sebagai ukuran untuk menyusun tipologi status pembangunan desa yang dibagi menjadi 3, antara lain:

1. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki pelayanan dasar yang memadai dengan akses yang mudah, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas dan transportasi yang mudah, layanan umum yang baik,

dan pemerintahan yang baik. Nilai IPD Desa Mandiri lebih dari 75,00.

2. Desa Berkembang: Desa yang memiliki pelayanan dasar, infrastruktur, transportasi, pelayanan umum, dan layanan pemerintah. Nilai IPD di desa yang berkembang adalah 50,00 hingga 75,00.
3. Desa Tertinggal adalah desa yang mana pelayanan dasar, prasarana, transportasi, layanan umum, dan fasilitas pemerintahan masih kurang. Nilai IPD Desa yang Tertinggal adalah kurang dari 50,00.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Eksisting Pembangunan Desa Tanjungsari Berdasarkan Parameter Indeks Pembangunan Desa

1. Kondisi Pelayanan Dasar

Aspek pelayanan dasar pada IPD mencakup pendidikan dan kesehatan. Pada sub aspek pendidikan, fasilitas pendidikan di Desa Tanjungsari ini sudah cukup lengkap dengan tersedianya fasilitas pendidikan berupa PAUD/TK, SD, SMP, dan SMA. Berdasarkan hasil survei lapangan pada tahun 2023 dan data potensi desa pada tahun 2021, Desa Tanjungsari memiliki jumlah fasilitas pendidikan yang sama dengan total delapan unit yang terdiri dari TK, SD, SMP, dan SMA/SMK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2 dan Gambar 1**.

Tabel 2 Jumlah Fasilitas Pendidikan Desa Tanjungsari

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD/TK	2
2.	SD	3
3.	SMP	1
4.	SMA/SMK	2
Jumlah		8

Sumber: Hasil survey lapangan tahun 2023 dan data potensi desa tahun 2021



Gambar 1 Peta Fasilitas Pendidikan

Sedangkan pada sub aspek kesehatan, Desa Tanjungsari memiliki beberapa fasilitas kesehatan untuk melayani kebutuhan masyarakat desa. Jarak menuju fasilitas kesehatan tersebut cukup dekat dengan akses yang mudah dan terjangkau sehingga masyarakat desa sangat mudah mendapatkan layanan kesehatan. Fasilitas kesehatan yang terdapat di Desa Tanjungsari antara lain puskesmas, praktek dokter, posyandu, bidan, poskesdes, dan apotek. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 3** dan **Gambar 2**.

Tabel 3 Jumlah Fasilitas Kesehatan Desa Tanjungsari

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Rumah Sakit	0
2.	Puskesmas	1
3.	Praktek Dokter	1
4.	Posyandu	9
5.	Balai Pengobatan	0
6.	Poskesdes	9
7.	Apotek	1
Jumlah		21

Sumber: Hasil survey lapangan tahun 2023 dan data potensi desa tahun 2021



Gambar 2 Peta Fasilitas Kesehatan

Di Desa Tanjungsari ini tidak terdapat rumah sakit maupun balai pengobatan. Tetapi untuk menuju rumah sakit terdekat memiliki jarak 8 km dan untuk ke balai pengobatan terdekat memiliki jarak 4,2 km dengan akses yang sangat mudah untuk menuju kedua fasilitas Kesehatan tersebut.

2. Kondisi Infrastruktur

Sarana ekonomi, energi, air bersih dan sanitasi, telekomunikasi, dan informasi adalah komponen infrastruktur IPD. Di Desa Tanjungsari, Anda akan menemukan berbagai fasilitas ekonomi seperti warung, toko, restoran, bengkel, fotokopi, jasa ekspedisi, dan pangkas rambut. Di Desa Tanjungsari tidak ada pasar maupun minimarket, tetapi banyak warung dan toko yang menjual kebutuhan sehari-hari. Hal ini memudahkan masyarakat desa untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari mereka. Pasar Rakyat Cijeruk terdekat berada di Desa Cipelang, hanya 1,2 km dari Desa Tanjungsari. Untuk lebih jelasnya mengenai fasilitas ekonomi dapat dilihat pada **Tabel 4** dan **Gambar 3**.

Tabel 4 Fasilitas Ekonomi Desa Tanjungsari

No.	Jenis Ekonomi	Jumlah
1.	Toko	11
2.	Warung	14
3.	Restoran	1
4.	Fotokopi	2
5.	Bengkel	4
6.	Jasa Ekspedisi	1
7.	Pangkas Rambut	3

Sumber: Hasil survey lapangan tahun 2023 dan data potensi desa tahun 2021



Gambar 3 Peta Fasilitas Ekonomi

Untuk sumber listrik di Desa Tanjungsari berasal dari PLN. Data potensi desa tahun 2021 menunjukkan bahwa Desa Tanjungsari tidak memiliki layanan listrik yang memadai. Keluarga penerima pelayanan listrik di Desa Tanjungsari hanya 1.657 dari total KK 2.072 atau sekitar 79,97%. Apabila dibandingkan dengan desa-desa lain, Desa Tanjungsari merupakan desa dengan yang terlayani listrik paling rendah di Kecamatan Cijeruk. Sedangkan untuk penerangan jalan umum di Desa Tanjungsari sudah sangat baik karena sudah tersebar merata dan diberikan oleh pemerintah.

Masyarakat Desa Tanjungsari sebagian besar menggunakan air sumur untuk mandi atau mencuci. Mereka juga menggunakan air isi ulang atau kemasan untuk minum. Di Desa Tanjungsari juga terdapat *Base Transceiver Station* (BTS) yang memiliki sinyal seluler yang kuat.

3. Kondisi Aksesibilitas/Transportasi

Aspek aksesibilitas pada IPD meliputi sarana transportasi dan aksesibilitas transportasi. Untuk jalan di Desa Tanjungsari didominasi oleh aspal/beton dengan lebar jalan sekitar 3,5 meter.

Sehingga jalan di Desa Tanjungsari dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda 4 sepanjang tahun. Selain itu, ada angkutan umum yang beroperasi secara teratur melalui jalan utama kecamatan. Angkutan umum tersebut dapat menyambungkan Desa Tanjungsari dengan daerah sekitarnya.

Sedangkan untuk aksesibilitas transportasi, Desa Tanjungsari terletak tidak jauh dari pusat kecamatan yang berada di Desa Cipelang yaitu berjarak 4,5 km dengan waktu tempuh 2 menit/km. sedangkan untuk menuju kantor bupati yang berjarak 30 km memerlukan waktu tempuh 4 menit/km. Untuk mencapai pusat kecamatan maupun kantor bupati dapat dilalui menggunakan kendaraan bermotor pribadi maupun kendaraan umum.

4. Kondisi Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum meliputi kesehatan masyarakat dan sarana olahraga. Untuk kesehatan masyarakat, Desa Tanjungsari dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang terdiri dari puskesmas, praktek dokter, bidan, poskesdes, dan apotek sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dan membantu desa untuk menanggulangi apabila adanya kejadian luar biasa (KLB) di Desa Tanjungsari. Namun menurut data potensi desa tahun 2021, sampai saat ini Desa Tanjungsari tidak ada KLB yang terjadi. Selain itu juga, fasilitas kesehatan yang terdapat di Desa Tanjungsari membantu desa dalam menekan angka gizi buruk melalui program-program yang telah dijalankan seperti posyandu, pelayanan keluarga berencana, dan perbaikan gizi. Dari program-program tersebut berhasil menekan angka gizi buruk di Desa Tanjungsari sehingga sampai saat ini, tidak ada penderita gizi buruk di Desa Tanjungsari.

Sedangkan di Desa Tanjungsari terdapat fasilitas olahraga yaitu lapangan sepak bola yang terdapat di RW 06. Selain itu, terdapat juga organisasi keolahragaan berupa klub sepakbola yang berjumlah 17 orang. Klub sepakbola tersebut sering mewakili Desa Tanjungsari untuk kontingen tingkat kecamatan maupun tingkat Kabupaten Bogor.

5. Kondisi Penyelenggaraan Pemerintahan

Sumber daya manusia yang baik dan kemandirian pemerintah desa adalah komponen penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Desa Tanjungsari didirikan dari kepala desa, sekretaris desa, dan enam pengurus. Mereka terdiri dari bagian umum dan tata usaha, keuangan dan bendahara, perencanaan, pemerintahan, pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain

itu, ada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di pemerintahan Desa Tanjungsari. BPD bertanggung jawab untuk menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat desa serta menyelenggarakan musyawarah desa. Dalam melaksanakan pemerintahan, Desa Tanjungsari dilengkapi kanto desa yang berada di dalam wilayah desa sebagai pusat kegiatan pemerintahan. Selain itu, hasil pajak dan retribusi membuat Desa Tanjungsari memiliki PAD (pendapatan asli daerah) sebesar 14%. Berdasarkan data potensi desa tahun 2021, Desa Tanjungsari memiliki asset atau kekayaan desa seperti hutan milik desa, bangunan desa seperti balai desa serta tempat wisata yang dapat meningkatkan perekonomian Desa Tanjungsari.

Untuk kualitas sumberdaya manusia pemerintah desa, tingkat pendidikan Kepala Desa Tanjungsari adalah SMA, sedangkan sekretaris desa memiliki tingkat pendidikan D3. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan pemerintahan Desa Tanjungsari dapat dilihat pada **Tabel 5**.

Tabel 5 Tingkat Pendidikan Pemerintah Desa Tanjungsari

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SMA	6
2.	D3	1
3.	S1	1

Sumber: Profil Desa Tanjungsari, 2021

3.2 Status Pembangunan Desa Tanjungsari

Untuk menggambarkan status pembangunan suatu desa dapat menggunakan Indeks Pembangunan Desa (IPD). Analisis perhitungan IPD adalah menggunakan data potensi desa yang menggambarkan kondisi pembangunan desa dalam kurun waktu periode pendataan. IPD setiap desa telah dihitung sebanyak dua kali dan dilakukan oleh Bappenas dan BPS yaitu pada tahun 2014 dan 2018. Sehingga untuk melihat tingkat kemajuan pembangunan Desa Tanjungsari dengan data potensi desa terbaru yaitu tahun 2021, penelitian ini menganalisis nilai IPD dan status pembangunan Desa Tanjungsari berdasarkan data potensi desa tahun 2021.

Untuk mendapatkan nilai IPD suatu desa adalah dengan melakukan analisis skoring pada masing-masing indikator yang telah diisi sesuai dengan data potensi desa tahun 2021 dengan menggunakan kriteria penilaian IPD. Untuk analisis skoring pada masing-masing indikator berdasarkan data potensi desa tahun 2021 Desa Tanjungsari dapat dilihat pada **Tabel 6**.

Tabel 6 Skor Indikator-Indikator IPD Desa Tanjungsari

Aspek	Indikator	Skor
Pelayanan Dasar	Ketersediaan dan akses TK	3
	Ketersediaan dan akses SD	3
	Ketersediaan dan akses SMP	4
	Ketersediaan dan akses SMA/SMK	4
	Ketersediaan dan akses rumah sakit	3
	Ketersediaan dan akses rumah sakit bersalin	3
	Ketersediaan dan kemudahan akses puskesmas	4
	Ketersediaan dan akses ke balai pengobatan	3
	Ketersediaan dan akses praktek dokter	4
	Ketersediaan dan akses bidan	4
	Ketersediaan dan akses poskesdes	5
	Ketersediaan dan akses apotek	4
	Infrastruktur	Ketersediaan pertokoan, minimarket dan toko kelontong
Ketersediaan pasar		0
Ketersediaan restoran atau warung makan		4
Ketersediaan hotel atau penginapan		0
Ketersediaan bank		0
Elektrifikasi		4
Kondisi penerangan di jalan utama		5
Bahan bakar memasak		5
Sumber air untuk minum		5
Sumber air untuk mandi/mencuci		4
Fasilitas buang air besar		5
Ketersediaan dan fasilitas komunikasi selular		5
Aksesibilitas	Ketersediaan fasilitas internet dan pengiriman pos	2

Aspek	Indikator	Skor
	Lalu lintas dan kualitas jalan	5
	Aksesibilitas jalan	5
	Ketersediaan angkutan umum	5
	Operasional angkutan umum	5
	Waktu tempuh ke kantor camat	4
	Biaya transportasi ke kantor camat	4
	Waktu tempuh ke kantor bupati	5
	Pelayanan umum	Biaya transportasi ke kantor bupati
Penanganan KLB		5
Penanganan gizi buruk		5
Ketersediaan fasilitas olahraga		1
Penyelenggaraan pemerintahan	Keberadaan kelompok kegiatan olahraga	1
	Kelengkapan pemerintahan desa	5
	Otonomi desa	3
	Aset/kekayaan desa	4
	Kualitas SDM kepala desa	3
	Kualitas SDM sekretaris desa	4

Sumber: Hasil Analisis, 2024.

Setelah penilaian atau skoring pada masing-masing indikator dari masing-masing elemen, analisis perhitungan nilai IPD dilakukan. Nilai IPD dapat diperoleh dari penjumlahan secara tertimbang terhadap masing-masing indikator IPD. Skor setiap indikator yang telah ditimbang atau dikalikan dengan bobot penimbang masing-masing indikator diperoleh sebagai hasil dari penjumlahan ini. **Tabel 7** menunjukkan hasil perhitungan nilai IPD Desa Tanjungsari berdasarkan data potensi desa tahun 2021.

Tabel 7 Nilai IPD Desa Tanjungsari tahun 2021

Aspek	Indikator	Nilai IPD
Pelayanan Dasar	Ketersediaan dan akses TK	0,0683556
	Ketersediaan dan akses SD	0,0346563
	Ketersediaan dan akses SMP	0,0962349
	Ketersediaan dan akses SMA/SMK	0,1283132

Aspek	Indikator	Nilai IPD	
	Ketersediaan dan akses rumah sakit	0,081489	
	Ketersediaan dan akses rumah sakit bersalin	0,0884318	
	Ketersediaan dan kemudahan akses puskesmas	0,1241892	
	Ketersediaan dan akses ke balai pengobatan	0,0926889	
	Ketersediaan dan akses praktek dokter	0,1303364	
	Ketersediaan dan akses bidan	0,0898014	
	Ketersediaan dan akses poskesdes	0,1260555	
	Ketersediaan dan akses apotek	0,1014264	
	Infrastruktur	Ketersediaan pertokoan, minimarket dan toko kelontong	0,039233
		Ketersediaan pasar	0
Ketersediaan restoran atau warung makan		0,0828552	
Ketersediaan hotel atau penginapan		0	
Ketersediaan bank		0	
Elektrifikasi		0,0961668	
Kondisi penerangan di jalan utama		0,0981385	
Bahan bakar memasak		0,108891	
Sumber air untuk minum		0,1497405	
Sumber air untuk mandi/mencuci		0,120552	
Fasilitas buang air besar		0,0985635	
Ketersediaan dan fasilitas komunikasi selular		0,0802015	

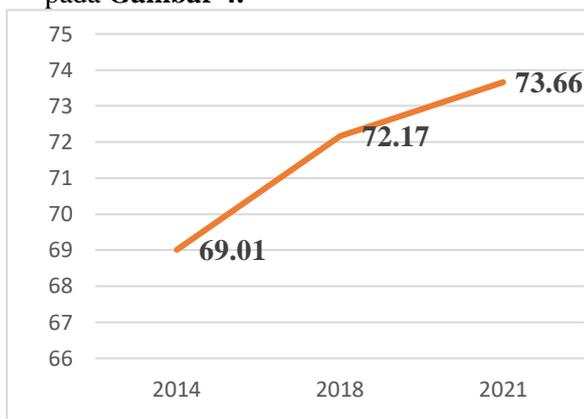
Aspek	Indikator	Nilai IPD
Aksesibilitas	Ketersediaan fasilitas internet dan pengiriman pos	0,0545928
	Lalu lintas dan kualitas jalan	0,0871370
	Aksesibilitas jalan	0,0749265
	Ketersediaan angkutan umum	0,213291
	Operasional angkutan umum	0,2112975
	Waktu tempuh ke kantor camat	0,0708516
	Biaya transportasi ke kantor camat	0,1120664
	Waktu tempuh ke kantor bupati	0,0710860
Pelayanan umum	Biaya transportasi ke kantor bupati	0,0529218
	Penanganan KLB	0,0097558
	Penanganan gizi buruk	0,1046695
	Ketersediaan fasilitas olahraga	0,0334978
Penyelenggaraan pemerintahan	Keberadaan kelompok kegiatan olahraga	0,0351981
	Kelengkapan pemerintahan desa	0,1500920
	Otonomi desa	0,0889282
	Aset/kekayaan desa	0,0889425
	Kualitas SDM kepala desa	0,0559245
	Kualitas SDM sekretaris desa	0,13174845
	Total	3,68324803
Nilai IPD	73,6649606	

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan analisis perhitungan yang telah dilakukan, status pembangunan desa dapat ditentukan melalui nilai IPD yang dihasilkan. Desa-desa ini dikelompokkan menjadi tiga kategori: desa mandiri dengan nilai IPD lebih dari 75,00; desa berkembang dengan nilai IPD antara 50,00 dan 75,00; dan desa tertinggal dengan nilai IPD kurang dari 50,00. Dari analisis perhitungan IPD tersebut, nilai IPD Desa Tanjungsari berdasarkan data potensi desa tahun 2021 adalah

73,66. Oleh karena itu status pembangunan Desa Tanjungsari berdasarkan nilai IPD tahun 2021 adalah berkembang karena memiliki nilai IPD 50,00 - 75,00.

Desa Tanjungsari terus mengalami peningkatan pembangunan karena nilai IPD Desa Tanjungsari mengalami kenaikan sebesar 3,16 dari IPD 69,01 pada tahun 2014 menjadi 72,17 pada tahun 2018 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021 sebesar 1,49 dengan nilai IPD menjadi 73,66 dengan status desa tetap berkembang. Untuk melihat grafik kenaikan nilai IPD dari tahun 2014, 2018, dan 2021 dapat dilihat pada **Gambar 4**.



Sumber: Hasil Analisis, 2024

Gambar 4 Nilai IPD Desa Tanjungsari 2014-2021

Meskipun Desa Tanjungsari mengalami peningkatan nilai IPD dari tahun 2014, 2018 dan 2021, namun status Desa Tanjungsari tetap berkembang. Hal ini dapat dikarenakan masih banyak indikator pada setiap aspek belum mencapai pelayanan maksimum. Pada aspek pelayanan dasar, hanya indikator ketersediaan dan akses poskesdes saja yang sudah mencapai pelayanan maksimum karena poskesdes di Desa Tanjungsari berjumlah 9. Tidak adanya rumah sakit, rumah sakit bersalin, dan balai pengobatan merupakan beberapa indikator yang masih kurang baik. Untuk fasilitas pendidikan seperti TK dan SD yang masih kurang dari 10 unit, SMP yang masih kurang dari 5 unit, dan juga SMA/SMK yang masih kurang dari 4 unit.

Pada aspek infrastruktur, di Desa Tanjungsari tidak tersedia minimarket, pasar, hotel atau penginapan, dan bank. Selain itu di Desa Tanjungsari juga tidak terdapat kelompok pertokoan dan jumlah toko atau warung kurang dari 100 unit. Hal ini juga dapat menjadi faktor Desa Tanjungsari masih berkembang. Namun pada Aspek infrastruktur juga sudah banyak indikator yang mencapai pelayanan

maksimum seperti penerangan jalan umum yang sudah tersedia di jalan-jalan utama, bahan bakar memasak yang masyarakat gunakan dominan menggunakan LPG, sumber air minum yang menggunakan air isi ulang, pada fasilitas buang air besar sebagian besar masyarakat desa sudah memiliki jamban sendiri dirumah, dan fasilitas komunikasi selular yaitu di Desa Tanjungsari memiliki BTS dan sinyal seluler yang kuat.

Dalam hal aksesibilitas dan transportasi, sudah cukup baik karena banyak indikator yang mencapai tingkat pelayanan terbaik, seperti kualitas jalan aspal dan beton, jalan yang dapat dilalui mobil sepanjang tahun, angkutan umum yang beroperasi setiap hari, dan waktu tempuh kurang dari 9 menit/km ke kantor bupati. Akan tetapi masih terdapat juga indikator yang masih kurang baik yang dapat menjadi faktor Desa Tanjungsari masih berkembang, seperti biaya transportasi untuk menuju kantor bupati yaitu sebesar Rp 25.000 sedangkan untuk mencapai pelayanan maksimum adalah kurang dari Rp 7.000, jadi selisih nya cukup besar antara kondisi eksisting dan standar IPD.

Sedangkan aspek pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan juga sudah cukup baik yang dapat dilihat pada aspek pelayanan umum, di Desa Tanjungsari tidak pernah ada kejadian luar biasa maupun gizi buruk. Namun saja untuk fasilitas olahraga masih sangat kurang dari pelayanan maksimum dikarenakan di Desa Tanjungsari hanya ada 1 lapangan olahraga dan 1 kelompok kegiatan olahraga yaitu lapangan sepak bola dan tim sepakbola. Ini mungkin menjadi salah satu alasan Desa Tanjungsari terus berkembang. Pada aspek penyelenggaraan pemerintah yang masih sedikit kurang dari pelayanan maksimum adalah indikator otonomi desa dan juga kualitas SDM kepala desa, hal ini dikarenakan PAD yang dimiliki Desa Tanjungsari adalah 14% sedangkan untuk mencapai pelayanan maksimum PAD yang dimiliki harus lebih besar dari 27%. Selain itu, kelengkapan pemerintahan desa merupakan indikator yang mencapai pelayanan maksimal karena Desa Tanjungsaris memiliki kepala desa dan perangkat desa serta BPD yang membantu menyelenggarakan pemerintahan. Dan juga Desa Tanjungsari dilengkapi kantor desa yang berada di dalam wilayah desa sebagai pusat kegiatan pemerintahan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Hasil analisis status pembangunan Desa Tanjungsari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:

1. Kondisi eksisting pembangunan desa di Desa Tanjungsari berdasarkan data profil desa, observasi lapangan, dan data potensi desa tahun 2021 masih terdapat beberapa aspek yang masih kurang lengkap dan baik dalam pembangunannya. Aspek yang masih kurang lengkap dan baik di Desa Tanjungsari yaitu aspek pelayanan dasar dan aspek infrastruktur karena dari kedua aspek tersebut masih terdapat beberapa fasilitas yang belum tersedia atau kurang di Desa Tanjungsari untuk melayani masyarakat desa. Namun aspek penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum, dan aksesibilitas dan transportasi sudah cukup baik.
2. Nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) Desa Tanjungsari berdasarkan data potensi desa tahun 2021 mengalami peningkatan dari angka 69,01 pada tahun 2014 dan 72,17 pada tahun 2018 menjadi 73,66 dengan status desa masih berkembang.

4.2 Saran

Hasil penelitian menghasilkan beberapa saran dan saran berikut:

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Pemerintah Desa Tanjungsari dan Pemerintah Kecamatan Cijeruk untuk mempercepat pembangunan Desa Tanjungsari.
2. Pemerintah Desa Tanjungsari dapat mengevaluasi pembangunan Desa Tanjungsari sehingga pembangunan yang akan direncanakan dapat merata, efektif dan efisien.
3. Indeks Pembangunan Desa Tanjungsari berdasarkan data potensi desa tahun 2021 dapat menjadi acuan peningkatan untuk pembangunan Desa Tanjungsari, sehingga IPD Desa Tanjungsari dapat terus meningkat menjadi desa mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2018). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu.
- Adisasmita, R. (2018). *Strategi Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan* (2nd ed.). Yogyakarta: Expert.
- Ariadi, A. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135–147.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Data Potensi Desa 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2021). *Kecamatan Cijeruk Dalam Angka 2021*. BPS Kabupaten Bogor.
- Deksa B., Ady., Nawawi, J., & Murfhi. (2011). Analisis Pelaksanaan Pelayanan Umum Di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 1–12.
- Despica, R. (2018). Tipologi Desa Berdasarkan Perkembangan Nagari Aur Begalung Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Penelitian, Terapan Ilmu Geografi dan Pendidikan Geografi*. 3(5).
- Fatmawati., Hakim, L., & Mappamiring. (2020). Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa. *Jurnal of Public Policy and Management*, 1(1), 15–21.
- Harry, S., Harmadi, B., Suchaini, U., & Adji, A. (2019). Indikator Pembangunan Desa Di Indonesia: Ditinjau Dari Ketidakesesuaian Indikator Pengukuran Pembangunan Desa. www.tnp2k.go.id
- Kabupaten Bogor. (2016). *Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036*. Kabupaten Bogor: Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Kushandajani. (2018). *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro..
- Muhamad M. L., & Suhardjo, A. J. (2004). Aksesibilitas Dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Di Perdesaan: Konsep Model Sustainable Accessibility Pada Kawasan Perdesaan Di Propinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Transportasi*, 4(2), 149–160.
- Mulyadi, M. (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa* (Pertama ed.). Yogyakarta: Nadi Pustaka.
- Ola W. Y., Maksimilianus G. A., & Hamidah I. A. (2023). *Arahan Pengembangan Desa Menuju Desa Mandiri Di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang*. Direction For Village Development Towards An Independent Village In

- Petungsewu Village, Dau District, Malang Regency.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rampi, J. F. L., Ruru, J. M., & Palar, N. R. A. (2019). Efektivitas Kerja Aparat Desa (Studi Kasus Di Desa Pakuue Dua Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Administrasi Publik*, 5(85).
- Sajangbati, Y. C. (2015). Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Lex Administratum*, 3(2), 24–32.
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 35–52.
- Suparmini, & Wijayanti, A. T. (2015). Masyarakat Desa dan Kota (Tinjauan Geografis, Sosiologis, dan Historis). In *Masyarakat Desa dan Kota (Tinjauan Geografis, Sosiologis dan Historis)*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Surya, A., & Wirabrata, A. (2010). Ketersediaan Dan Pembenahan Infrastruktur Dalam Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 2(1), 257–277.
- Syamsul, B. (2010). Pengantar Geografi Desa. Al-Washliyah University Press.
- Tantowi, R. (2019). Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sebagai Strategi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Review Terhadap Peraturan Pemerintah). 3(2).
- Prayitno, G., Wicaksono, A. D., & Irawati, H. (2020). Klasifikasi Desa Berdasarkan Tingkat Kemajuan Desa (Studi Kasus Kecamatan Pujon Kabupaten Malang). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya*. 9(2).

PENULIS

- 1. Nur Afifah Oktaviani S. PWK Alumni (2024)** Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Pakuan.
nrafifahoktavianii@gmail.com

- 2. Dr. Mujio, S.Pi., M.Si**

Pembimbing I/Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Pakuan.

- 3. Novida Waskitaningsih, ST., MT**

Pembimbing I/Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Pakuan.